

Pendampingan Kewirausahaan: Penata Kelembagaan UMKM di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar

Entrepreneurship Assistance: MSME Institutional Management in Siantar Martoba District, Pematangsiantar City

Hengki Mangiring Parulian Simarmata^{1*}, Henry Dunan Pardede², Poltak Pardamean Simarmata³, Doris Yolanda Saragih⁴

^{1,2,3} Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Indonesia

⁴ Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar, Indonesia

hengkisimarmata.mm@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Sriwijaya No.9, Baru, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21147

Korespondensi penulis: hengkisimarmata.mm@gmail.com

Article History:

Received: September 01, 2024;

Revised: September 15, 2024;

Accepted: September 08, 2024;

Published: Oktober 10, 2024;

Keywords: MSMEs, Institutional Arrangement, Business support

Abstract: Institutional administrators have an important role in developing MSME businesses in Indonesia. The role of institutional administrators is to encourage business actors to obtain training support, financial access and market access by strengthening cooperation between Government, financial institutions and non-governmental organizations. This activity aims to provide business actors in Siantar Martoba District with an understanding of the formation of business institutions being pursued. The activity method is carried out by planning, implementing and evaluating activities. The activity was carried out using a seminar model, which was attended by 31 participants who were livestock and weaving business people in Siantar Martoba District. Evaluation of the activity showed that 95% of participants felt the benefits of the activity and provided new insight into the importance of institutional arrangements to gain access to support from various parties.

Abstrak

Penata kelembagaan memiliki peran penting bagi perkembangan usaha UMKM di Indonesia. Peran penata kelembagaan dapat mendorong pelaku usaha mendapatkan dukungan pelatihan, akses keuangan, dan akses pasar dengan memperkuat kerja sama antar pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non pemerintah. Tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang ada di Kecamatan Siantar Martoba dalam pembentukan kelembagaan usaha yang sedang ditekuni. Metode kegiatan dilakukan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan model seminar yang diikuti 31 peserta yang merupakan pelaku usaha ternak dan tenun yang berada di Kecamatan Siantar Martoba. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa 95% peserta merasakan manfaat dari kegiatan dan memberikan wawasan baru mengenai pentingnya penataan kelembagaan untuk memperoleh akses dukungan dari berbagai pihak.

Kata Kunci: UMKM, Penataan Kelembagaan, Dukungan bisnis

1. PENDAHULUAN

Pelaku usaha memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Pelaku usaha yang disebut dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan daerah dan produk domestik bruto (PDB) Negara, namun juga memberikan peluang lapangan kerja yang besar bagi masyarakat, mendorong terciptanya inovasi produk, dan meningkatkan kesejahteraan (Arifin 2005). Karena memiliki peran yang sangat penting, maka pelaku usaha memiliki potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian namun sering mendapat berbagai tantangan yang menghambat.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha adalah kurangnya akses terhadap modal, akses sumber daya, dan informasi serta sangat minim dukungan dari kelembagaan yang memadai (Gantika, Heri, and Caesar 2020). Pelaku usaha tidak memahami betul bagaimana manajemen usaha, membuat perencanaan keuangan, memasarkan produk, dan pengolahan barang yang berkualitas (Kato et al. 2021). Kendala yang sering dihadapi mengakibatkan pelaku usaha tidak mampu bersaing secara kompetitif. Salah satu faktor penyebab kurangnya struktur kelembagaan dan jaringan dukungan bagi pelaku usaha mendapatkan bantuan seperti bantuan pelatihan, bantuan teknis, dan akses mendapatkan pembiayaan.

Penata kelembagaan bagi pelaku usaha jika dilakukan dengan baik akan memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi, mendapatkan sumber daya, meningkatkan kapasitas manajerial, dan mampu untuk meningkatkan jaringan bisnis yang lebih luas lagi (Rahmayani et al. 2023; Hartono 2016). Hal ini pada gilirannya akan memiliki kontribusi yang efektif dalam peningkatan daya saing usaha. Akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Beberapa langkah dapat dilakukan dalam penataan kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Adapun langkah yang dilakukan dalam penataan kelembagaan bagi pelaku usaha khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diantaranya sebagai berikut (Mustanir et al. 2022):

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan dan Potensi UMKM. Kegiatan ini diawali dengan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan spesifik pelaku usaha di berbagai sektor. Kemudian menilai potensi dan kapasitas yang dibuat sesuai dengan area pengembangan yang akan difokuskan.
- b. Pembentukan lembaga pendukung. Langkah berikutnya dengan mendirikan lembaga pendukung yang fokus pada pendampingan dan pengembangan UMKM seperti kegiatan pusat pelayanan dan inkubator bisnis. Melakukan penguatan peran lembaga yang suda ada

dengan memperluas beberapa fungsi dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM.

- c. Peningkatan kapasitas manajerial. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang pentingnya manajemen usaha, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan teknologi informasi. Menghadirkan mentor dan konsultan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku usaha.
- d. Pembangunan jaringan dan kerja sama. Kegiatan dilakukan dengan memfasilitasi pembentukan jaringan antar pelaku UMKM, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non pemerintah. Tahapan berikutnya dilakukan dengan mendorong adanya kerja sama antar pelaku UMKM yang saling mendukung dan berbagi sumber daya, informasi dan pengalaman usaha.
- e. Akses Pembiayaan. Mengembangkan program pembiayaan yang ditujukan pada pelaku usaha, termasuk di dalamnya pinjaman mikro, dan skema pembiayaan alternatif. Kemudian mendorong lembaga keuangan untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan pelaku UMKM dalam hal pembiayaan
- f. Dukungan kebijakan dan regulasi. Advokasi kebijakan pengembangan UMKM contohnya insentif pajak yang diberikan dan adanya perlindungan hukum. Mendorong pelaku UMKM untuk terlibat dalam perumusan kebijakan.
- g. Monitoring dan evaluasi, Kegiatan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan UMKM dan dampak dari penataan kelembagaan yang telah dilakukan. Melakukan evaluasi program dan kegiatan serta melakukan penyesuaian jika dibutuhkan.
- h. Promosi dan pemasaran. Kegiatan dilakukan dengan mengembangkan strategi promosi untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan lain juga dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas mengikuti turnamen, bazar. Platform online untuk meningkatkan visibilitas dari usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan sebuah seminar untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Kecamatan Siantar Martoba dengan melakukan seminar dan pendampingan dalam penguatan kelembagaan untuk kelompok usaha yang ada di Kecamatan Siantar Martoba.

2. METODE

Pelaksanaan Pengabdian dilakukan dengan model seminar yang menghadirkan pembicara dari Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar dan mitra yaitu Camat Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pematangsiantar. Kegiatan ini merupakan hasil MOU antara Pihak Universitas dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat khususnya Kecamatan Siantar Martoba. Kegiatan berlangsung Rabu, tanggal 18 Agustus 2024 di aula Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar. Jumlah peserta yang ikut 31 peserta baik dari masyarakat, perwakilan mitra, mahasiswa dan panitia PKM. Metode kegiatan dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui masalah yang terdapat di lingkungan masyarakat dengan melakukan kunjungan ke Kecamatan Siantar Martoba. Hasil survey lapangan, tim dosen melakukan rapat dengan mahasiswa untuk merumuskan rencana kegiatan pengabdian masyarakat dengan menetapkan objek pengabdian, menyusun proposal pengabdian, menuliskan RAB, menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing tim. Tahapan persiapan diuraikan dibawah ini:

- a. Tim dosen melakukan survey lapangan untuk mengetahui persoalan yang ada di lingkungan pendidikan.
- b. Tim dosen kemudian merumuskan proposal pengabdian dan melakukan pertemuan dengan mahasiswa untuk membahas topik yang telah di susun, RAB, pembagian masing-masing tugas dan tanggung jawab.
- c. Menghubungi para mitra dan menyampaikan rencana kegiatan berdasarkan proposal PKM yang telah disusun.
- d. Menghubungi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Siantar Martoba untuk dapat menghadiri kegiatan dan memberikan undangan.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan, Kegiatan dilaksanakan di aula Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 31 peserta. Undangan diberikan kepada mitra sebagai narasumber dan undangan kepada peserta untuk menghadiri kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan berlangsung hari Rabu, 8 Agustus 2024. Kegiatan dimulai pukul 09:00 wib sampai 13:00 Wib yang dibagi

menjadi beberapa sesi yaitu sesi pembukaan, sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Saat sesi penutup, panitia mengucapkan terima kasih dan membagikan kuesioner sebagai bahan evaluasi kegiatan PKM.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Seminar yang dilakukan atas kerja sama yang baik antara panitia dengan mitra yang terdiri dari Camat Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, Dinas Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar, dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pematangsiantar. Pertama kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembuka, dan kata sambutan dari setiap perwakilan mitra kegiatan. Kata sambutan disampaikan setiap perwakilan kepada peserta seperti yang di tunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian kata sambutan dari setiap mitra PKM

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pematangsiantar Bpk Herbet Auran menyampaikan perkembangan UMKM yang ada di kota Pematangsiantar telah mencapai 26.000 dan terus berupaya untuk melakukan inovasi baik dari segi metode, peningkatan kualitas produk, bahan yang digunakan sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya. Pak Helbert juga menambahkan informasi mengenai pelaku usaha tenun ulos yang sangat potensial sebanyak 4.000 orang, yang masih dapat dikembangkan dan dilatih dalam naungan UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kota Pematangsiantar.

Kegiatan PKM memberikan pemahaman dan informasi baru bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk yang mampu diserap pasar dan berada dalam satu kelembagaan yang dapat membantu pelaku usaha mendapatkan bantuan baik berupa dana, bantuan pelatihan pengelolaan, pelatihan manajemen keuangan, dan pemasaran. Pentingnya pelaku usaha dalam melakukan penataan kelembagaan diantaranya disebabkan karena (a) peran penting UMKM

dalam perekonomian nasional, (b) dukungan terhadap daya saing UMKM, (c) fragmentasi kebijakan dan program pendukung, (d) akses terhadap pembiayaan dan investasi, (e) regulasi dan kepatuhan, dan (f) inklusi digital dan teknologi.

Pembicara ke dua dari Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, Bpk Henry Dunan Pardede., M.M menyampaikan materi tentang Penataan kelembagaan kelompok usaha UMKM bagi calon penerima manfaat Akses Reforma Agraria Tahun 2024. Materi yang disampaikan dengan menjelaskan konsep kelembagaan yaitu sekumpulan jaringan dan relasi sosial yang melibatkan orang yang memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma serta memiliki struktur. Pembicara menjelaskan lebih jauh tentang (a) manfaat adanya penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria kepada calon penerima manfaat, (b) hal yang dibutuhkan dalam pembentukan kelompok peternak yang baik dan benar, dan (c) bagaimana memotivasi anggota kelompok dalam pengembangan peternakan.

Persentase yang dijelaskan narasumber dimulai dari pemahaman tentang kelembagaan berdasarkan aturan main dan organisasi. Slide berikutnya narasumber menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kelembagaan berdasarkan (a) kebutuhan yaitu sesuai dengan kebutuhan, (b) efektif yaitu kemampuan mencapai tujuan, (c) efisien yaitu pilihan yang murah, mudah, dan sederhana, (d) fleksibel yaitu sesuai dengan eksistensi sumber daya alam yang tersedia, (e) manfaat yaitu dapat memberikan manfaat yang besar, (f) pemerataan yaitu pembagian benefit secara merata dan proporsional, dan (g) keberlanjutan yaitu ada jaminan berlanjut.

Untuk memberikan pedalaman materi, Bpk Henry menyampaikan regulasi yang harus dipahami oleh peserta seperti:

- a. Undang-Undang tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Bagaimana perbandingan setiap kriteria dari UMKM berdasarkan UU UMKM 2008 dan PP UMKM No.7/2021.
- c. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan PP 24 tahun 2018 tentang IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Dijelaskan bahwa perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau dengan online single submission (OSS) merupakan bentuk perizinan berusaha yang diterbitkan dari Lembaga OSS untuk, dan atas nama materi, pimpinan lembaga, gubernur, atau walikota/bupati kepada pelaku usaha melalui sebuah sistem elektronik yang sudah terintegrasi.
- d. Nomor Induk Berusaha

Untuk meningkatkan motivasi dari peserta yang merupakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar. Pembicara memberikan tips untuk menjadi pelaku UMKM seperti pentingnya (a) akses permodalan, (b) inovasi dalam berbisnis, (c)

memiliki SDM berkualitas, (c) pentingnya pencatatan dan laporan keuangan, (d) memiliki strategi memenuhi permintaan pasar, dan (e) pemanfaatan internet. Peserta juga mendapatkan materi tentang manfaat dan fungsi manajemen dalam usaha seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi keuangan, dan fungsi sumber daya manusia.

Akhir dari kegiatan peserta diberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi untuk mendalami materi yang disampaikan tentang penguatan kelembagaan untuk pelaku UMKM. Kegiatan penyampaian materi ditunjukkan pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penguatan Kelembagaan

Selanjutnya kegiatan dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab peserta terhadap narasumber untuk mendapatkan solusi nyata mengenai kendala yang terjadi di lapangan. Kegiatan tanya jawab di pandu oleh moderator. Kegiatan dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Kegiatan diskusi dan tanya jawab dipandu moderator

Setelah kegiatan pemaparan materi, kegiatan dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Beberapa pertanyaan diajukan mengenai manfaat dari membentuk kelembagaan kelompok, apa saja dokumen syarat yang harus dipersiapkan dalam pengajuan nama kelompok usaha, dan bagaimana cara untuk mendapatkan akses bantuan dana, dan bantuan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa pertanyaan lain juga disampaikan,

kemudian narasumber memberikan jawaban detail mengenai pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Sehingga para peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya.



Gambar 4. Foto bersama peserta, pembicara, dan panitia

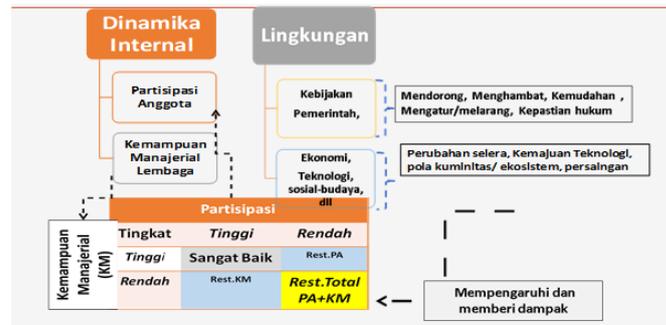
Setelah kegiatan selesai maka panitia melakukan sesi foto bersama sebagai bukti kegiatan telah terlaksana dan berjalan baik seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Para peserta merasakan manfaat dari kegiatan ini dan akan menerapkan semua masukan yang telah disampaikan oleh narasumber dengan tetap berkoordinasi dengan narasumber sebagai pendamping dalam pendaftaran kelompok yang akan membuat koperasi sebagai bentuk wadah lembaga sehingga kegiatan lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dari segi pemodal, pelatihan SDM, dan lainnya.

4. DISKUSI

Pelaksanaan PKM berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat Kecamatan Siantar Martoba terutama dalam hal bagaimana membentuk kelembagaan usaha. Hal ini dilakukan karena beberapa pelaku UMKM mendapatkan manfaat akses reforma agraria tahun 2024 di Pematangsiantar sehingga perlu benar-benar membentuk kelembagaan usaha. Para pelaku usaha yang mendapatkan manfaat akses reforma agraria dari kelompok tenun ulos dan kelompok ternak.

Hasil seminar menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai topik kelembagaan dan syarat yang harus di persiapkan dalam mengurus pendirian koperasi berdasarkan kelompok usaha. Beberapa point yang peserta dapatkan adalah (a) adanya re-orientasi dan re-aktualisasi rencana kegiatan yang telah disusun, (b) meningkatkan kapasitas dan kapabel pelaku UMKM dalam hierarki kelembagaan, (c) mendorong kemandirian peserta, dan (d) menganalisis peran dan dukungan dari pihak terkait (Sitompul et al. 2022).

Pemahaman mengenai perlunya penguatan dimulai dari dinamika internal dengan adanya partisipasi anggota kemudian anggota memiliki kemampuan manajerial. Selanjutnya dari lingkungan perlu adanya dukungan dari kebijakan pemerintah dalam mendorong dan memberikan kemudahan, dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Tabel penguatan kelembagaan di tunjukkan pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Penguatan kelembagaan

Beberapa tahapan dalam penguatan kelembagaan di jelaskan sebagai berikut:

- Asesmen data subjek dan kelembagaan: proses penentuan asesmen berdasarkan hasil pemetaan sosial.
- Pembentukan kelompok/badan usaha: fokus pada subjek yang belum memiliki kelembagaan ekonomi untuk dibentuk kelompok berdasarkan sektor usaha.
- Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha: fokus pada subjek yang sudah memiliki kelompok usaha dengan kegiatan menyusun asesmen kelembagaan, rencana aksi, maupun dokumen pendukung kelembagaan.

Dalam kegiatan penyusunan perencanaan penguatan kelembagaan mala ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Penyusunan perencanaan dilakukan dengan kunjungan lokasi akses, bagaimana menetapkan subjek yang akan didampingi, dan bagaimana menentukan tindak lanjut dari kegiatan yang akan diberikan terhadap subjek. Langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok usaha. Pembentukan kelompok usaha dilakukan pada subjek yang belum pernah memiliki kelompok atau kelembagaan ekonomi. Ketentuan yang diberlakukan adalah usaha reforma agraria dengan kriteria sebagai berikut (Thaha 2009):

- Telah dilakukan pendataan subjek melalui kegiatan pemetaan sosial pada fase 1.
- Telah memiliki sektor usaha yang sama atau berada dalam wilayah administrasi RT atau RW dalam lingkup kelurahan atau desa.
- Bersedia mau bergabung membentuk kelompok usaha, kelompok pendampingan.
- Bersedia untuk melakukan pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas sesuai dengan rencana kegiatan penanganan akses.

- e. Bersedia berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan penanganan akses reforma agraria.
- f. Bersedia mendorong keberlanjutan kegiatan penanganan akses sehingga mendapatkan manfaat dan dampak dari berbagai kegiatan penanganan akses semakin dapat dirasakan oleh subjek.

Dalam pembentukan kelompok masyarakat ada beberapa hal yang harus dilaksanakan yaitu (a) melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa atau Camat. Dalam rangka menunjang kesiapan pembentukan kelompok maka masing-masing pihak perlu melakukan koordinasi dengan perangkat daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti calon kelompok yang telah teridentifikasi untuk pengusulan pembentukan kelompok. (b) fasilitas pembentukan kepengurusan organisasi dimana terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota (Zaenuri, Atmojo, and Iqbal 2020; Yuniati, Susilo, and Albayumi 2017).

Langkah terakhir dalam prasyarat penyusunan tata kelembagaan organisasi dengan membuat anggaran dasar/anggaran rumah tangga dalam kelompok yang memuat point berikut

- a. Nama Kelompok Usaha
- b. Waktu dan tempat pembentukan
- c. Keanggotaan dan kepengurusan
- d. Tujuan, fungsi, dan asas
- e. Bentuk usaha dan kegiatan
- f. Besar dan asal modal atau aset bersama
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian
- h. Pengembangan menjadi unit usaha
- i. Mekanisme rapat dan musyawarah
- j. Aturan tambahan jika diperlukan
- k. Menyesuaikan kebutuhan

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan maka panitia melakukan survey kepada peserta dengan penyebaran kuesioner. Hasil kuesioner yang dibagikan 95% peserta memahami materi yang disampaikan dan puas akan kegiatan yang telah berjalan dengan baik.

5. KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilakukan berjalan dengan baik atas adanya kerja sama Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar dengan para mitra dan masyarakat di Kecamatan. Kegiatan ini memberikan pemahaman penting bagi pelaku usaha untuk menyusun kelembagaan demi mengembangkan usaha yang ada di lingkungannya. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses penataan kelembagaan dimulai dari (a) melakukan identifikasi kebutuhan dan tantangan pelaku usaha, (b) melakukan penguatan kelembagaan pemerintah, (c) adanya simplifikasi regulasi dan birokrasi, (d) pengembangan akses pembiayaan, (e) pembentukan jaringan kemitraan, (f) penguatan kapasitas sumber daya manusia, (g) peningkatan akses pasar, (h) penguatan infrastruktur pendukung, dan (i) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam kegiatan PKM sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan PKM berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, time schedule, pembiayaan, koordinasi dan kerja sama dengan mitra.
- b. Komunikasi dan kerja sama yang baik dilakukan oleh Camat Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, Dinas Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar, dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pematangsiantar sebagai wujud real dari MOU dengan dinas pemerintahan yang ada di Kota Pematangsiantar
- c. Peserta seminar memahami dan memberikan respons positif atas kegiatan. Penilaian kegiatan dilakukan dengan memberikan survey atas narasumber, materi yang disampaikan, pemahaman materi, lokasi kegiatan dimana umpan balik menunjukkan 95% merasa puas.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Bustanul. 2005. *Ekonomi Kelembagaan Pangan*. LP3ES.
- Gantika, Soma, Heri, and Muhamad Ridwan Caesar. 2020. "Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Di Kabupaten Bandung Barat." *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1: 13–30.
- Hartono, Darminto. 2016. "Eksistensi Pembentukan Lembaga Pemeringkat Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4: 462–72.
- Kato, Iskandar, Ahmad Faridi, Erika Revida, Darwin Damanik, Robert Tua Siregar, Sukarman Purba, Unang Toto Handiman Bonaraja Purba, et al. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mustanir, Ahmad, Monalisa Ibrahim, Muhammad Rusdi, and Madeali Jabbareng. 2022. *PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*

Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. Penerbit Qiara Media.

Rahmayani, Dwi, Maya Indah Sulistiyowati, Bhanu Rasendriyo, Badar Fadlan Ibrahim, Riska Widya Sabita, Fatima Amalia Putri, Qurnia Latifa Nur Sarwestri, Selviana Diah Utami, Ageng Patriot Dibangsa, and Ardian Alif Mustofa. 2023. *Ekonomi Kelembagaan Dan Digitalisasi Sektor Pertanian.* Penerbit NEM.

Sitompul, Rosalinda Septiani, Meidy Lieke Karundeng, Friskia Hanatul Qolby, Vivi Candra, Nasah Annisa Ilmi Faried, Fastabiqul Khairad, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Mochamad Sugiarto, S N Arfandi, and Wa Ode Suwarni. 2022. *UMKM Dan Koperasi.* Yayasan Kita Menulis.

Thaha, Rasyid. 2009. "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 39–62.

Yuniati, Sri, Djoko Susilo, and Fuat Albayumi. 2017. "Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu." *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)* 2017, no. 2016: 498–505.

Zaenuri, Muchamad, Muhammad Eko Atmojo, and Muhammad Iqbal. 2020. "Penataan Kelembagaan Bumdes Berbasis Pariwisata." *ABDIMAS ALTRUIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2: 28–36. <https://doi.org/10.24071/aa.v2i2.2544>.